



**PIDATO KETUA DPR RI
PADA RAPAT PARIPURNA DPR RI
PENUTUPAN MASA PERSIDANGAN III
TAHUN SIDANG 2021-2022**

JUM'AT, 18 FEBRUARI 2022

**DEWAN PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA
2022**



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**PIDATO KETUA DPR RI
PADA RAPAT PARIPURNA DPR RI
PENUTUPAN MASA PERSIDANGAN III
TAHUN SIDANG 2021 - 2022**

JUM'AT, 18 FEBRUARI 2022

*Assalamu'alaikum warohmatullahi wabarokatuh,
Salam Sejahtera bagi kita semua,
Om Swasti Astu,
Namo Buddhaya,
Salam Kebajikan,*

Yang kami hormati:

- **Para Wakil Ketua DPR RI;**
- **Para Anggota DPR RI;**
- **Hadirin sekalian yang berbahagia.**

Puji syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Esa, yang telah memberikan rahmat, karunia, dan hidayah-Nya sehingga kita dapat hadir dalam Rapat Paripurna Penutupan Masa Persidangan III Tahun Sidang 2021-2022.

Atas nama Pimpinan, kami memberikan apresiasi kepada seluruh Anggota DPR RI yang telah bekerja secara optimal selama masa sidang ini yang juga masih berada pada situasi tekanan pandemi Covid-19, untuk menyelesaikan tugas konstitusional dalam fungsi legislasi, anggaran, pengawasan dan diplomasi, dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Dalam menjalankan tugas konstitusionalnya, DPR RI semakin dituntut untuk dapat membangun sistem parlemen yang semakin maju. Dimana hal ini ditunjukkan baik secara formal maupun secara substansi materi fungsi konstitusional DPR RI.

Saat ini, dengan kemajuan Teknologi informasi komunikasi, Rakyat dapat selalu memonitor segala bentuk kegiatan DPR RI, baik itu kegiatan rapat, kunjungan kerja, kegiatan menghadiri undangan kelembagaan, kegiatan audiensi dengan masyarakat.

Menjadi tanggung jawab kita bersama untuk mewujudkan DPR RI yang semakin memenuhi harapan rakyat, dalam meningkatkan derajat kualitas kehidupan rakyat disegala bidang. Kita dapat mengambil langkah kecil yang menunjukkan komitmen, kemauan, dan kerja bersama, dengan dimulai dari: menjaga kehormatan dan kedudukan sebagai anggota DPR RI; memperkuat substansi dalam menjalankan fungsi legislasi, anggaran serta pengawasan; serta membangun budaya keadaban demokrasi sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia yaitu gotong royong, kerja bersama, saling menghargai, bersikap terbuka, mengutamakan musyawarah mufakat, dan mengutamakan kepentingan NKRI.

Dengan komitmen, kemauan, dan kerja bersama dari kita semua, seluruh pimpinan dan anggota DPR RI, maka

DPR RI akan semakin maju dalam menjalankan kedaulatan rakyat.

Sidang Dewan yang terhormat,

DPR RI dalam melaksanakan fungsi legislasi, pada masa sidang ini telah melakukan:

- a. Pengambilan Keputusan Tingkat I terhadap 9 (*sembilan*) Rancangan Undang-Undang (RUU) menjadi Undang Undang dan
- b. Pengambilan Keputusan terhadap 7 (*tujuh*) RUU sebagai Usul Inisiatif DPR RI.

Penuntasan sejumlah RUU ditujukan untuk dapat memenuhi kebutuhan hukum nasional, meningkatkan kesejahteraan rakyat dan memperkuat pembangunan nasional. DPR RI bersama dengan Pemerintah terus berkomitmen dan bekerja untuk menuntaskan sejumlah RUU prioritas Tahun 2022 yang sedang dibahas dalam Pembicaraan Tingkat I.

Undang Undang tentang Ibu Kota Negara, telah disahkan dan telah menjadi komitmen bersama antara Pemerintah dan DPR RI untuk mewujudkan amanat Undang Undang tersebut sesuai dengan kewenangan konstitusionalnya. Ibu Kota Negara dimasa yang akan datang, menjadi wajah kemajuan Indonesia yang tampil modern dan berwawasan lingkungan.

Pembangunan Ibu Kota Negara diharapkan dapat menjadi pendorong perubahan besar di Indonesia dalam menyongsong Indonesia sebagai kekuatan ekonomi dunia di masa yang akan datang.

Dengan kerja bersama, gotong royong, dari seluruh pemangku kepentingan dan semua anak bangsa, maka Indonesia sebagai kekuatan ekonomi dunia pada tahun 2045, akan terwujud.

Marilah kita kawal bersama jalan menuju kemajuan Indonesia.

Sidang Dewan yang terhormat,

Pada Masa Persidangan III ini, DPR RI melalui Alat Kelengkapan Dewan juga telah melakukan fungsi anggaran melalui rapat bersama mitra kerja guna melakukan evaluasi kinerja dan pencapaian pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2021. DPR RI menyampaikan apresiasi atas capaian realisasi anggaran Kementerian/Lembaga pada Tahun Anggaran 2021 yang relatif baik.

Evaluasi pelaksanaan anggaran 2021 oleh kementerian/lembaga dapat menjadi landasan pada tahun 2022 ini, dalam meningkatkan kinerja pemerintah untuk memberikan pelayanan umum, program pembangunan, serta pemulihan sosial dan ekonomi menghadapi pandemi covid-19.

Pemerintah agar mempersiapkan langkah-langkah mitigasi terhadap berbagai tantangan pada tahun 2022 ini, yang pada kuartal pertama telah dihadapkan pada tekanan kasus omicron. Pemulihan sosial dan ekonomi

pada tahun 2022 ini, akan memberikan landasan dalam melakukan konsolidasi fiskal pada tahun 2023.

Selanjutnya DPR RI akan terus memonitor dan mengevaluasi agar pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2022 dikelola secara efektif, efisien, dan transparan dalam mendorong percepatan pemulihan sosial ekonomi serta percepatan reformasi struktural dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Berbagai permasalahan pada masa sidang ini, telah dibahas oleh DPR RI melalui alat kelengkapan dewan, dalam melaksanakan fungsi pengawasan.

Beberapa permasalahan yang menjadi perhatian dan pembahasan oleh Alat Kelengkapan Dewan antara lain adalah:

- Permasalahan Mafia Pupuk;
- Permasalahan Pencairan Dana Jaminan Hari Tua;
- Pelaksanaan program vaksinasi *booster* Covid-19;
- Permasalahan Konflik Desa Wadas, Jawa Tengah;

- Permasalahan Karangkeng Manusia di Kabupaten Langkat;
- Penerapan PPKM dan Sistem WFH selama Pandemi Covid-19 Gelombang Ketiga;
- Permasalahan Pengawasan dan Pengetatan Karantina bagi Pelaku Perjalanan Luar Negeri;
- Persiapan Pemindahan Ibu Kota Negara dan Pembentukan Regulasi sebagai Turunan UU IKN;
- Permasalahan Kebocoran Data Pasien Covid-19.
- Penyelesaian kasus-kasus di Industri Jasa Keuangan

DPR RI melalui Alat Kelengkapan Dewan juga telah melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap:

1. 7 (*tujuh*) Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum RI Masa Jabatan 2022 - 2027;
2. 5 (*lima*) Calon Anggota Badan Pengawas Pemilu RI Masa Jabatan 2022-2027; dan
3. Duta Besar Negara Sahabat untuk Republik Indonesia.

Uji kelayakan dan kepatutan tersebut dilaksanakan secara terbuka, transparan, dan dapat disaksikan oleh masyarakat.

DPR RI bersama dengan Pemerintah dan Komisi Pemilihan Umum RI (KPU RI) telah menyepakati tanggal pemungutan suara Pemilu Serentak Tahun 2024 yang akan dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024 dan Pilkada Serentak Tahun 2024 yang akan dilaksanakan pada tanggal 27 November 2024. Selanjutnya DPR RI, Pemerintah dan KPU akan mempersiapkan setiap tahapan penyelenggaraan pemilu 2024 tsb sesuai dengan kewenangannya.

DPR RI akan terus mendukung Pemerintah dan Penyelenggara Pemilu agar setiap tahapan Pemilu Tahun 2024 dapat berjalan dengan demokratis dan dapat memenuhi hak konstitusional rakyat. Negara harus dapat menjamin pelaksanaan Pemilu secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dapat terlaksana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Sidang Dewan yang terhormat,

DPR RI, akan menjadi tuan rumah Sidang IPU ke-144 Tahun 2022 yang akan diselenggarakan pada bulan Maret mendatang. Berbagai persiapan sedang dilakukan untuk mensukseskan penyelenggaraan dan sidang IPU tersebut.

Sidang IPU, akan menjadi momentum bagi parlemen berbagai negara untuk membangun komitmen global dalam upaya menghadapi Pandemi Covid-19 dan dampaknya, sehingga setiap negara memiliki kemampuan untuk bangkit dan pulih, serta tidak ada negara yang ditinggalkan dan tertinggal untuk maju.

Dalam memperjuangkan kepentingan nasional Indonesia di forum internasional, DPR RI melalui fungsi diplomasi parlemen, juga telah melakukan beberapa pertemuan kerja sama antarparlemen, antara lain dengan delegasi negara Ukraina, Slovakia, dan Spanyol. Ketiga negara tersebut berkomitmen untuk meningkatkan kerja sama dalam berbagai bidang, mulai

dari pendidikan, budaya, ekonomi, teknologi, pertahanan serta produk-produk kesehatan.

Pada kegiatan lainnya, BKSAP juga telah sukses meluncurkan White Paper Green Economy (Buku Putih Ekonomi Hijau) di Gianyar, Bali pada 12 Januari 2022. Peluncuran tersebut adalah untuk mengingatkan bahwa pemanasan global merupakan ancaman serius akibat perubahan iklim, sehingga berbagai instrumen kebijakan, baik di tingkat pusat maupun daerah harus mampu menyelamatkan lingkungan terhadap dampak yang lebih besar.

Sidang Dewan yang Terhormat,

Dalam tekanan situasi ketidakpastian Pandemi Covid-19 dan ancaman resiko yang dihadapi, anggota DPR RI telah menunjukkan komitmennya yang tinggi dalam menuntaskan berbagai agenda legislasi, anggaran, pengawasan, dan diplomasi. Marilah kita jaga bersama, kedudukan dan kehormatan DPR RI dalam menjalankan

kedaulatan rakyat dengan membangun budaya demokrasi yang berkeadaban.

Atas nama Pimpinan DPR RI, saya mengumumkan kepada seluruh rakyat Indonesia, mulai tanggal 19 Februari 2022 sampai dengan 14 Maret 2022 DPR RI memasuki Masa Reses Masa Persidangan III Tahun Sidang 2021-2022. Masa reses merupakan kesempatan bagi seluruh Anggota DPR RI, untuk menyapa dan mendengarkan aspirasi masyarakat, khususnya di daerah pemilihannya masing-masing; serta sampaikan tugas konstitusional yang telah dilakukan oleh DPR RI; mari kita persatukan rakyat dalam semangat gotong royong untuk memajukan Indonesia.

Kami ucapkan “Selamat Bekerja”, Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Esa, memberikan rahmat dan bimbingan-Nya bagi kita semua.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

**KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA,**

Ttd.

Dr. (H.C) PUAN MAHARANI

LAMPIRAN:

I. 9 (*sembilan*) Rancangan Undang-Undang (RUU) menjadi Undang-Undang (UU) yaitu:

1. RUU tentang Ibu Kota Negara;
2. RUU tentang Sistem Keolahragaan Nasional;
3. RUU tentang Provinsi Kalimantan Timur;
4. RUU tentang Provinsi Kalimantan Selatan;
5. RUU tentang Provinsi Kalimantan Barat;
6. RUU tentang Provinsi Sulawesi Tenggara;
7. RUU tentang Provinsi Sulawesi Utara;
8. RUU tentang Provinsi Sulawesi Tengah; dan
9. RUU tentang Provinsi Sulawesi Selatan; dan

II. Pengambilan Keputusan RUU Usul Inisiatif DPR RI:

1. RUU tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
2. RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
3. Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Sumatera Barat;

4. Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Riau;
5. Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Jambi;
6. Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi NTB; dan
7. Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi NTT.

III. Anggota KPU Masa Jabatan 2022-2027:

1. August Mellaz;
2. Betty Epsilon Idroos;
3. Hasyim Asy'ari;
4. Idham Holik;
5. Mochammad Afifudin;
6. Parsadaan Harahap;
7. Yulianto Sudrajat.

IV. Anggota Bawaslu RI Masa Jabatan 2022-2027:

1. Herwyn Jefler Hielsa Malonda;

2. Lolly Suhenty;
3. Puadi;
4. Rahmat Bagja;
5. Totok Haryono.